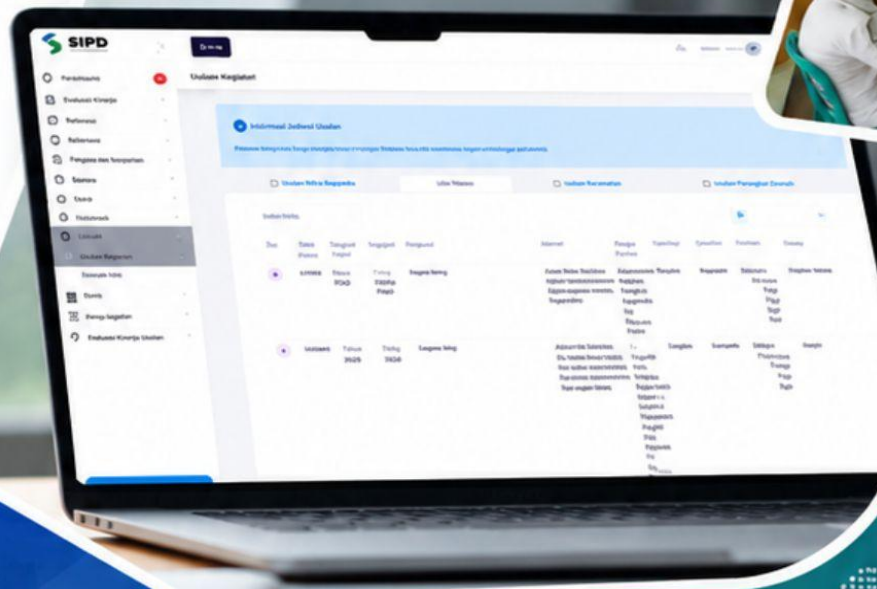


PEDOMAN TEKNIS
MONGOLIA

**MUSRENBANG ONLINE
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

2024



PARTISIPATIF

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa batas jarak



TRANSPARAN

Rekam jejak digital
seluruh proses
Musrenbang



EFISIEN

Mengoptimalkan waktu dan biaya pelaksanaan perencanaan



BERBASIS DATA

Pengambilan keputusan berdasarkan data usulan dan kebutuhan riil

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Teknis MONGOLIA (Musrenbang Online) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 *dapat disusun dengan baik.*

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi MONGOLIA yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai inovasi tata kelola penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan. Inovasi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan proses bisnis Musrenbang melalui integrasi pembahasan usulan pembangunan dengan mekanisme klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan secara kolaboratif dan *real-time* menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

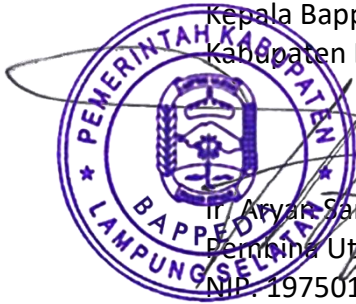
Penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelaksanaan MONGOLIA, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan Musrenbang, proses verifikasi usulan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat, baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun pemangku kepentingan lainnya, memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan MONGOLIA sehingga proses perencanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan menghasilkan data usulan pembangunan yang berkualitas.

Pedoman teknis ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta kebijakan mengenai inovasi daerah. Substansi yang disajikan di dalamnya merupakan hasil pengembangan praktik penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang telah dioptimalkan melalui penerapan inovasi MONGOLIA sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta berkontribusi dalam penyusunan pedoman teknis ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan MONGOLIA serta mendukung terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa pedoman teknis ini masih dapat terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan regulasi, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hasil evaluasi implementasi MONGOLIA pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Kalianda, 8 Januari 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Selatan,

Ir. Aryan Saruhjan, S.P., M.E., I.P.U.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19750111 200003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud & Tujuan	4
BAB II	6
2.1 Konsep Inovasi	6
2.3 Solusi Inovasi Mongolia.....	8
2.4 Proses Bisnis Inovasi Mongolia	10
2.5 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak	13
BAB III	15
3.1 Timeline Pelaksanaan Mongolia	15
3.2 Mekanisme Pelaksanaan Mongolia	17
3.2.1 Persiapan Pelaksanaan	18
3.2.2 Pelaksanaan Forum Musrenbang	18
3.2.3 Verifikasi dan Penyempurnaan Data	19
3.2.4 Validasi Usulan	19
3.2.5 Dokumentasi dan Pelaporan.....	19
3.3 Standar Operasional Mongolia	20
3.3.1 Ketentuan Operasional	21

3.4 Monitoring dan Evaluasi Mongolia	23
3.4.1 Monitoring Pelaksanaan	23
3.4.2 Evaluasi Pelaksanaan	24
3.4.3 Pelaporan Hasil Pelaksanaan	25
3.4.4 Tindak Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi	26
BAB IV	27

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sistematis dalam menentukan arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum penyelarasan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara rutin menyelenggarakan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang Kabupaten. Forum ini menjadi media utama dalam menjaring aspirasi masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, serta menyelaraskan usulan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang secara konvensional masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan.

Pelaksanaan Musrenbang secara tatap muka menyebabkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan belum dapat berlangsung secara optimal. Kendala geografis,

keterbatasan mobilitas, serta keterbatasan waktu sering kali menghambat kehadiran peserta dalam forum Musrenbang sehingga proses penyampaian aspirasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, penyelenggaraan Musrenbang secara luring memerlukan biaya operasional yang relatif besar, baik untuk perjalanan dinas, konsumsi, maupun kebutuhan logistik lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efisiennya penyelenggaraan Musrenbang.

Selain aspek partisipasi dan efisiensi, proses verifikasi usulan pembangunan juga masih memerlukan waktu yang relatif panjang. Pada mekanisme sebelumnya, usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa maupun kecamatan umumnya baru diverifikasi setelah pelaksanaan forum selesai, sehingga proses klarifikasi terhadap usulan sering kali harus dilakukan secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi menjadi kurang efektif serta memperlambat proses penyempurnaan data usulan pembangunan.

Sejalan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), proses penginputan usulan pembangunan sebenarnya telah dilakukan secara digital oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Namun demikian, pemanfaatan SIPD masih belum diintegrasikan secara optimal dengan pelaksanaan forum Musrenbang. Verifikasi terhadap usulan masih dilakukan secara bertahap sehingga proses validasi belum berlangsung secara simultan antara forum pembahasan dan sistem informasi yang digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan inovasi *Musrenbang Online Kabupaten Lampung Selatan (MONGOLIA)* sebagai transformasi proses bisnis penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Inovasi ini dikembangkan melalui integrasi pelaksanaan forum Musrenbang dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sehingga proses pembahasan usulan pembangunan tidak lagi dipisahkan dari proses verifikasi dan penyempurnaan data. Pendekatan tersebut menghasilkan mekanisme kerja yang lebih efektif, efisien, serta mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data.

Melalui MONGOLIA admin desa dan admin kecamatan tetap melakukan penginputan usulan pembangunan ke dalam SIPD-RI sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung, Tim Verifikator Bappeda melakukan wawancara, klarifikasi, dan verifikasi langsung terhadap setiap usulan bersama admin pengusul. Apabila diperlukan penyempurnaan data, perbaikan dapat langsung dilakukan pada SIPD-RI sehingga hasil verifikasi tersimpan dan dapat diketahui secara *real-time*. Mekanisme ini menjadikan proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, hingga validasi usulan berlangsung secara terpadu dalam satu forum Musrenbang.

Nilai kebaruan MONGOLIA terletak pada perubahan proses bisnis Musrenbang yang mengintegrasikan forum pembahasan dengan proses verifikasi usulan secara kolaboratif dan *real-time* melalui SIPD-RI. Sebelum inovasi ini diterapkan, verifikasi usulan dilakukan setelah forum Musrenbang selesai sehingga memerlukan koordinasi lanjutan dan memperpanjang proses penyempurnaan data. Melalui MONGOLIA, seluruh proses tersebut diselesaikan dalam satu siklus kegiatan, sehingga usulan pembangunan yang dihasilkan telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi secara langsung sebelum ditetapkan sebagai bahan penyusunan prioritas pembangunan daerah.

MONGOLIA bukan merupakan pengembangan aplikasi baru, melainkan inovasi tata kelola pemerintahan yang mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI melalui integrasi proses bisnis Musrenbang. Inovasi ini mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, mempercepat proses verifikasi usulan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghasilkan data usulan pembangunan yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan mekanisme MONGOLIA secara terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Lampung Selatan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, kolaboratif, dan berbasis data.

1.2 Dasar Hukum

Pedoman Teknis Musrenbang Online Kabupaten Lampung Selatan (MONGOLIA) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
4. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/263/V.02/HK/2024 tentang Penetapan Inovasi dan Pelaksana Inovasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud & Tujuan

Pedoman Teknis Musrenbang Online Kabupaten Lampung Selatan (MONGOLIA) disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui mekanisme yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai proses bisnis MONGOLIA, mekanisme pembahasan dan verifikasi usulan pembangunan, pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, serta tata cara pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Pedoman Teknis Musrenbang Online Kabupaten Lampung Selatan (MONGOLIA) bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan MONGOLIA bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Musrenbang yang terintegrasi dengan SIPD-RI.
2. Mewujudkan integrasi proses bisnis Musrenbang dengan proses verifikasi usulan pembangunan melalui pemanfaatan SIPD-RI, sehingga pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses verifikasi usulan pembangunan melalui mekanisme verifikasi secara kolaboratif dan *real-time* antara Tim Verifikator Bappeda, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa pada saat forum Musrenbang berlangsung.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas data usulan pembangunan melalui proses klarifikasi dan penyempurnaan secara langsung pada SIPD-RI, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, valid, dan siap digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Mendorong terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, kolaboratif, dan berbasis data melalui optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI.

BAB II

Konsep dan Rancang Bangun Inovasi Mongolia

2.1 Konsep Inovasi

Musrenbang Online Kabupaten Lampung Selatan (MONGOLIA) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai transformasi proses bisnis penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) tanpa mengubah substansi Musrenbang sebagai forum partisipatif dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Berbeda dengan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang sebelumnya, MONGOLIA tidak berfokus pada pengembangan aplikasi baru, melainkan pada perubahan proses bisnis Musrenbang. Inovasi ini mengintegrasikan proses pembahasan usulan pembangunan dengan proses klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan yang dilakukan secara kolaboratif dan *real-time* melalui SIPD-RI pada saat forum Musrenbang berlangsung. Dengan mekanisme tersebut, proses verifikasi yang sebelumnya dilaksanakan setelah forum Musrenbang dapat diselesaikan dalam satu rangkaian kegiatan.

Melalui MONGOLIA, admin desa dan admin kecamatan tetap menyampaikan usulan pembangunan melalui SIPD-RI sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat forum Musrenbang berlangsung, Tim Verifikator Bappeda melakukan klarifikasi dan verifikasi langsung bersama admin pengusul berdasarkan data yang tersedia pada SIPD-RI. Apabila diperlukan penyempurnaan, perbaikan data dapat segera dilakukan dan hasilnya langsung tersimpan pada sistem. Dengan demikian, seluruh pihak memperoleh data usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Nilai kebaruan (*novelty*) MONGOLIA terletak pada integrasi proses bisnis Musrenbang dengan mekanisme verifikasi usulan secara kolaboratif dan *real-time* melalui SIPD-RI. Pendekatan ini menghilangkan pemisahan antara forum pembahasan dan proses verifikasi administrasi, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif, waktu penyelesaian usulan lebih singkat.

2.2 Permasalahan Sebelum Inovasi

Sebelum diterapkannya MONGOLIA, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Lampung Selatan masih menghadapi beberapa kendala dalam proses pengelolaan dan verifikasi usulan pembangunan. Meskipun usulan telah diinput melalui SIPD-RI, proses pembahasan dan verifikasi belum berlangsung secara terpadu sehingga memengaruhi efektivitas penyusunan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Proses Pembahasan dan Verifikasi Belum Terintegrasi

Pelaksanaan forum Musrenbang dan proses verifikasi usulan masih dilaksanakan secara terpisah. Setelah forum selesai, Tim Verifikator Bappeda masih harus melakukan klarifikasi dan verifikasi lanjutan terhadap usulan yang telah dibahas, sehingga memperpanjang tahapan penyelesaian usulan pembangunan.

b. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Belum Optimal

Proses klarifikasi usulan antara Tim Verifikator Bappeda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah belum dilakukan secara bersamaan dalam satu forum. Akibatnya, penyelesaian permasalahan usulan sering memerlukan komunikasi berulang yang menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efektif.

c. Penyempurnaan Data Memerlukan Tahapan Lanjutan

Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan informasi pada usulan pembangunan, penyempurnaan data baru dilakukan setelah forum Musrenbang selesai. Kondisi ini

menyebabkan proses perbaikan memerlukan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antar pemangku kepentingan.

d. Proses Verifikasi Belum Dilaksanakan Secara *Real-Time*

Meskipun SIPD-RI telah digunakan sebagai media penginputan usulan, pemanfaatannya belum dioptimalkan sebagai sarana verifikasi pada saat forum Musrenbang berlangsung. Akibatnya, status hasil verifikasi belum dapat diketahui secara langsung oleh seluruh pihak yang terlibat.

e. Efektivitas Penyusunan Prioritas Pembangunan Belum Optimal

emisahan antara pembahasan forum dan proses verifikasi menyebabkan hasil Musrenbang belum sepenuhnya didukung oleh data usulan yang telah terverifikasi pada saat pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan data usulan yang siap digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan Musrenbang bukan terletak pada mekanisme penyampaian usulan maupun penggunaan SIPD-RI sebagai aplikasi perencanaan, melainkan pada belum terintegrasinya proses pembahasan forum dengan proses verifikasi usulan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi tata kelola yang mampu mengintegrasikan kedua proses tersebut sehingga pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan dapat dilaksanakan secara kolaboratif dalam satu rangkaian kegiatan.

2.3 Solusi Inovasi Mongolia

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan MONGOLIA sebagai inovasi tata kelola yang mengintegrasikan proses pembahasan Musrenbang dengan proses verifikasi usulan

pembangunan melalui pemanfaatan SIPD-RI. Inovasi ini berfokus pada penyempurnaan proses bisnis Musrenbang sehingga pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan dapat dilaksanakan secara terpadu dalam satu rangkaian kegiatan.

Melalui inovasi MONGOLIA diterapkan beberapa perubahan mendasar sebagai berikut.

1. Seluruh usulan pembangunan diinput ke dalam SIPD-RI sebelum pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2. Tim Verifikator Bappeda melakukan klarifikasi, wawancara, dan verifikasi langsung terhadap setiap usulan pembangunan bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan pada saat forum Musrenbang berlangsung.
3. Apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan, admin pengusul dapat langsung melakukan perbaikan pada SIPD-RI berdasarkan hasil pembahasan dan verifikasi yang telah disepakati dalam forum.
4. Hasil verifikasi dan penyempurnaan usulan langsung tersimpan pada SIPD-RI secara *real-time* sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang sama mengenai status usulan pembangunan.
5. Seluruh proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, dan penyempurnaan usulan terdokumentasi secara sistematis sebagai bagian dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

Melalui mekanisme tersebut proses verifikasi yang sebelumnya dilaksanakan setelah forum Musrenbang kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari forum pembahasan. Setiap usulan pembangunan dapat diklarifikasi, diverifikasi, disempurnakan, dan divalidasi secara kolaboratif dalam satu forum. MONGOLIA mentransformasikan proses Musrenbang dari mekanisme yang memisahkan pembahasan dan verifikasi menjadi mekanisme yang mengintegrasikan pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan secara kolaboratif dan *real-time* melalui SIPD-RI.

Tabel 2.1 Core Value Mongolia

Sebelum Mongolia	Setelah Mongolia
Musrenbang dan verifikasi dilakukan terpisah	Musrenbang dan verifikasi dilakukan dalam satu forum
SIPD hanya sebagai media input usulan	SIPD menjadi media input, verifikasi, dan finalisasi urusan
Verifikasi dilakukan bertahap	Verifikasi dilakukan kolaboratif
Perubahan data dilakukan setelah forum	Perubahan data dilakukan saat proses berlangsung
Hasil final diperoleh beberapa waktu setelah Musrenbang	Hasil final diperoleh padahari yang sama
Proses Lebih lama	Cepat, Transparan, Akurat

Sebelum MONGOLIA diterapkan, proses Musrenbang berlangsung secara bertahap sehingga pembahasan forum dan proses verifikasi administrasi berjalan pada waktu yang berbeda. Melalui inovasi MONGOLIA, kedua proses tersebut diintegrasikan menjadi satu siklus kerja sehingga penyempurnaan data usulan dapat dilakukan secara langsung pada saat forum berlangsung.

2.4 Proses Bisnis Inovasi Mongolia

MONGOLIA merupakan inovasi tata kelola perencanaan pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), yaitu aplikasi resmi milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi ini tidak mengembangkan aplikasi baru, melainkan mentransformasikan proses bisnis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui integrasi proses pembahasan usulan dengan proses klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan secara kolaboratif dan *real-time* pada SIPD-RI.

Sebelum diterapkannya MONGOLIA, proses pembahasan usulan dalam forum Musrenbang dan proses verifikasi administrasi dilaksanakan secara terpisah. Setelah forum selesai, Tim Verifikator

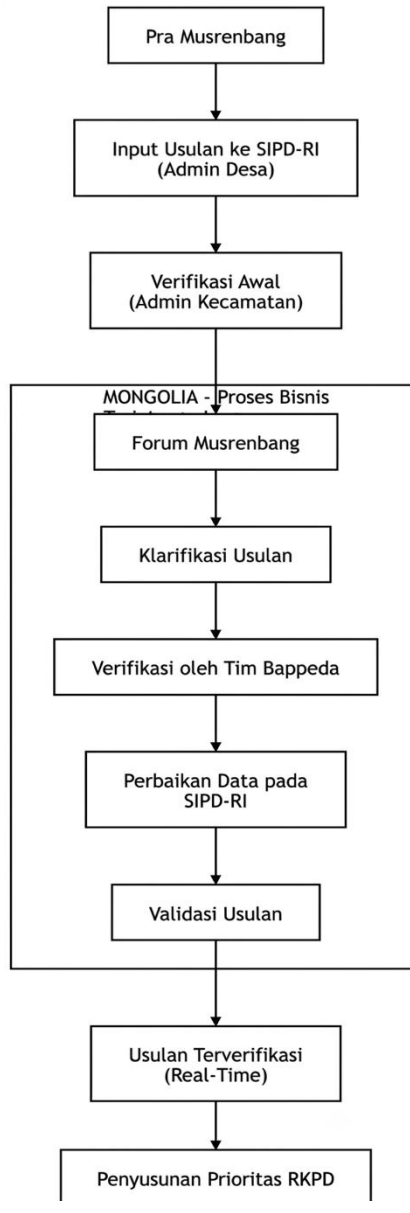
Bappeda masih melakukan klarifikasi dan verifikasi lanjutan terhadap usulan yang telah dibahas, sehingga memerlukan koordinasi tambahan dan memperpanjang waktu penyelesaian usulan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyempurnaan data belum dapat diselesaikan secara langsung pada saat forum Musrenbang berlangsung.

Melalui MONGOLIA, mekanisme tersebut diubah menjadi satu proses yang terintegrasi. Admin desa dan admin kecamatan tetap melakukan penginputan usulan pembangunan ke dalam SIPD-RI sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan Musrenbang. Selanjutnya, pada saat forum Musrenbang berlangsung, Tim Verifikator Bappeda melakukan wawancara, klarifikasi, dan verifikasi langsung terhadap setiap usulan bersama admin pengusul berdasarkan data yang tersedia pada SIPD-RI. Apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan, admin pengusul dapat langsung melakukan perbaikan pada sistem sesuai hasil pembahasan yang telah disepakati.

Setiap perubahan yang dilakukan selama proses verifikasi langsung tersimpan pada SIPD-RI sehingga status usulan dapat diperbarui secara *real-time*. Dengan mekanisme tersebut, proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan yang saling terintegrasi. Seluruh pihak yang terlibat memperoleh informasi yang sama mengenai hasil pembahasan dan status usulan tanpa memerlukan proses verifikasi lanjutan setelah forum Musrenbang selesai.

Transformasi proses bisnis ini menghasilkan mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien karena mampu mengurangi tahapan koordinasi yang berulang, mempercepat penyelesaian usulan pembangunan, meningkatkan kualitas dan konsistensi data pada SIPD-RI, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Musrenbang. Dengan demikian, MONGOLIA menghadirkan model tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Gambar 1. Proses Bisnis Mongolia



Gambar di atas menunjukkan proses bisnis MONGOLIA yang mengintegrasikan tahapan pembahasan Musrenbang dengan proses klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan pembangunan dalam satu rangkaian kegiatan yang terpadu. Proses diawali dengan identifikasi permasalahan dan penginputan usulan pembangunan oleh pemerintah desa ke dalam SIPD-RI, kemudian dilakukan verifikasi awal oleh pemerintah kecamatan sebelum usulan dibahas dalam forum Musrenbang.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, proses verifikasi pada MONGOLIA tidak lagi dilakukan setelah forum Musrenbang selesai. Selama forum berlangsung, Tim Verifikator Bappeda melakukan klarifikasi dan verifikasi secara langsung terhadap setiap usulan bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan berdasarkan data yang tersedia pada SIPD-RI. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau diperlukan penyempurnaan, admin pengusul dapat langsung melakukan perbaikan pada sistem sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan forum.

Setiap perubahan yang dilakukan selama proses verifikasi langsung tersimpan pada SIPD-RI sehingga status usulan diperbarui secara *real-time*. Dengan demikian, hasil Musrenbang yang dihasilkan merupakan usulan yang telah melalui proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, dan validasi, sehingga siap digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah tanpa memerlukan tahapan verifikasi lanjutan setelah forum berakhir.

Transformasi proses bisnis tersebut merupakan nilai kebaruan (*novelty*) MONGOLIA. Inovasi ini mengubah mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dari proses yang memisahkan forum pembahasan dengan verifikasi administrasi menjadi proses yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data.

2.5 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak

Keberhasilan implementasi MONGOLIA bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam memastikan proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan pembangunan dapat dilaksanakan secara terintegrasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Pembagian peran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Peran dan Tanggung Jawab

Aktor	Peran	Tanggung Jawab
Bappeda	Koordinator	Mengoordinasikan penyelenggaraan MONGOLIA dan penetapan prioritas
Tim Verifikator	Verifikator	Klarifikasi, verifikasi, validasi usulan
Kecamatan	Koordinator Wilayah	Verifikasi awal dan fasilitasi Musrenbang
Pemerintah Desa	Pengusul	Menyusun dan memperbaiki usulan pada SIPD-RI
Admin SIPD-RI	Operator	Memperbarui data dan memastikan sinkronisasi <i>real-time</i>
Masyarakat	Pemberi Usulan	Menyampaikan aspirasi pembangunan

Pelaksanaan MONGOLIA menempatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu mekanisme kerja yang terintegrasi. Pemerintah desa menyusun dan menginput usulan pembangunan, pemerintah kecamatan melakukan verifikasi awal, sedangkan Tim Verifikator Bappeda melaksanakan klarifikasi, verifikasi, dan validasi usulan secara langsung selama forum Musrenbang berlangsung. Melalui koordinasi tersebut, penyempurnaan data dapat dilakukan secara *real-time* pada SIPD-RI sehingga menghasilkan usulan pembangunan yang telah terverifikasi sebagai dasar penyusunan prioritas RKPD.

BAB III

Pelaksanaan Mongolia

3.1 Timeline Pelaksanaan Mongolia

Pelaksanaan MONGOLIA merupakan bagian yang terintegrasi dalam siklus penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan. Inovasi ini tidak menggantikan tahapan perencanaan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melainkan menyempurnakan proses bisnis pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan melalui mekanisme klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan pembangunan secara kolaboratif dan *real-time* menggunakan SIPD-RI.

Berdasarkan Calendar of Events Penyusunan RKPD Tahun 2025, pelaksanaan MONGOLIA berada pada tahapan Musrenbang RKPD Kecamatan yang dilaksanakan pada 24 Januari sampai dengan 21 Februari 2024 di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahapan inilah proses bisnis MONGOLIA diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh usulan pembangunan yang dibahas dalam forum Musrenbang telah melalui proses verifikasi secara langsung sehingga menghasilkan data usulan yang lebih berkualitas, akurat, dan siap digunakan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum tahapan pelaksanaan MONGOLIA terdiri atas kegiatan sebelum pelaksanaan Musrenbang, kegiatan selama forum Musrenbang berlangsung, dan kegiatan setelah forum Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD.

Table 3.1 Timeline Mongolia

Tahapan RKPD	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ket
Konsultasi Publik							Penyempurnaan Rawal
Pokok Pikiran DPRD							Sinkronisasi Pokir
Musrenbang Kecamatan (Monoglia)							Implementasi Mongolia
Musrenbang Kabupaten							Bahan Mengacu pada Mongolia
Review Rankhir							Finalisasi RKPD
Penetapan RKPD							Penetapan Perbup

Pelaksanaan MONGOLIA pada tahapan Musrenbang RKPD Kecamatan dirancang untuk membangun keterpaduan antara proses pembahasan usulan pembangunan dengan proses klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi data dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan setiap usulan yang diajukan oleh pemerintah desa tidak hanya dibahas berdasarkan kebutuhan dan prioritas wilayah, tetapi juga diverifikasi secara langsung terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian nomenklatur, kewenangan, lokasi, serta aspek teknis lainnya melalui SIPD-RI. Seluruh proses berlangsung secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Tim Verifikator Bappeda, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.

Pada saat forum Musrenbang berlangsung, interaksi antara peserta forum dan Tim Verifikator tidak lagi terbatas pada penyampaian usulan maupun pemberian tanggapan, tetapi juga mencakup proses klarifikasi terhadap substansi usulan yang diajukan. Apabila ditemukan informasi yang belum lengkap atau terdapat data yang perlu disesuaikan, admin pengusul dapat melakukan penyempurnaan secara langsung pada SIPD-RI berdasarkan hasil pembahasan dan

kesepakatan forum. Mekanisme tersebut memungkinkan perubahan data dilakukan pada saat yang sama ketika proses verifikasi berlangsung sehingga seluruh peserta memperoleh informasi yang seragam mengenai status dan hasil pembahasan setiap usulan pembangunan.

Integrasi tahapan tersebut juga memperkuat koordinasi antaraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbang. Pemerintah desa memperoleh ruang untuk menjelaskan latar belakang dan urgensi usulan pembangunan, pemerintah kecamatan memastikan kesesuaian usulan dengan kebutuhan wilayah, sedangkan Tim Verifikator Bappeda melakukan pengujian terhadap kelayakan usulan berdasarkan ketentuan perencanaan pembangunan. Keterlibatan aktif seluruh pihak dalam satu forum menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mengurangi kebutuhan koordinasi lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang selesai.

Penerapan MONGOLIA pada tahapan Musrenbang RKPD Kecamatan juga mendukung tersedianya data usulan pembangunan yang lebih berkualitas sebagai masukan dalam tahapan penyusunan RKPD berikutnya. Setiap usulan yang diteruskan ke Musrenbang RKPD Kabupaten telah melalui proses pembahasan dan verifikasi sehingga memiliki tingkat validitas yang lebih baik dibandingkan mekanisme sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan bagi Bappeda dan perangkat daerah dalam melakukan proses sinkronisasi, penentuan prioritas pembangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Mongolia

Pelaksanaan MONGOLIA dilaksanakan melalui mekanisme yang mengintegrasikan proses pembahasan usulan pembangunan dengan proses klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi data secara langsung dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Mekanisme ini mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai media pengelolaan usulan pembangunan sehingga setiap perubahan yang dilakukan selama proses Musrenbang dapat diperbarui secara *real-time*.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang memisahkan forum Musrenbang dengan proses verifikasi administrasi setelah forum selesai, MONGOLIA menempatkan seluruh proses tersebut dalam satu rangkaian kegiatan. Setiap usulan dibahas, diverifikasi, disempurnakan, dan divalidasi pada saat forum berlangsung sehingga menghasilkan data usulan yang lebih akurat, lengkap, dan siap digunakan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Secara operasional, mekanisme pelaksanaan MONGOLIA terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

3.2.1 Persiapan Pelaksanaan

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini, pemerintah desa melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masyarakat, menyusun prioritas usulan, serta melakukan penginputan usulan ke dalam SIPD-RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah kecamatan selanjutnya melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan administrasi dan memastikan seluruh usulan siap untuk dibahas pada forum Musrenbang.

Bappeda sebagai penyelenggara mempersiapkan jadwal pelaksanaan, pembagian Tim Verifikator, perangkat pendukung, serta data usulan yang akan digunakan selama proses Musrenbang berlangsung.

3.2.2 Pelaksanaan Forum Musrenbang

Pada tahap pelaksanaan, forum Musrenbang menjadi ruang koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, dan Tim Verifikator Bappeda. Setiap desa mempresentasikan usulan pembangunan yang telah diinput pada SIPD-RI beserta latar belakang dan urgensi usulan tersebut.

Selama proses pembahasan berlangsung, Tim Verifikator melakukan klarifikasi terhadap setiap usulan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa, data pada SIPD-RI, serta dokumen pendukung lainnya. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian usulan dengan

kebutuhan wilayah, kewenangan pemerintah daerah, nomenklatur kegiatan, lokasi, dan aspek teknis lainnya.

3.2.3 Verifikasi dan Penyempurnaan Data

Setelah proses klarifikasi selesai, Tim Verifikator melakukan verifikasi terhadap setiap usulan pembangunan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau data yang belum lengkap, admin desa maupun admin kecamatan melakukan penyempurnaan data secara langsung pada SIPD-RI berdasarkan hasil pembahasan forum.

Perubahan data yang dilakukan selama forum berlangsung secara otomatis tersimpan pada SIPD-RI sehingga seluruh peserta forum memperoleh informasi yang sama mengenai perkembangan status usulan. Mekanisme ini mengurangi kebutuhan koordinasi lanjutan setelah Musrenbang selesai karena proses perbaikan telah dilakukan pada saat pembahasan berlangsung.

3.2.4 Validasi Usulan

Setelah seluruh usulan memenuhi persyaratan administrasi maupun substansi, Tim Verifikator melakukan validasi terhadap usulan pada SIPD-RI. Validasi dilakukan sebagai bentuk konfirmasi bahwa usulan telah sesuai dengan hasil pembahasan forum dan memenuhi ketentuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil validasi menjadi dasar penyusunan daftar prioritas pembangunan yang selanjutnya digunakan dalam pembahasan pada Musrenbang RKPd tingkat Kabupaten.

3.2.5 Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh hasil pelaksanaan Musrenbang didokumentasikan sebagai bagian dari proses administrasi penyelenggaraan MONGOLIA. Dokumentasi meliputi berita acara Musrenbang, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, hasil verifikasi usulan, serta rekapitulasi usulan yang telah divalidasi pada SIPD-RI.

Dokumen tersebut menjadi arsip pelaksanaan Musrenbang sekaligus bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Musrenbang pada tahun berikutnya.

3.3 Standar Operasional Mongolia

Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) MONGOLIA disusun sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi, konsisten, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga proses pembahasan, klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan pembangunan dapat berlangsung secara efektif.

Pelaksanaan SOP MONGOLIA mengedepankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIPD-RI sebagai media utama pengelolaan usulan pembangunan. Seluruh pelaksana wajib menjalankan tugas sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing serta memastikan setiap perubahan data dilakukan berdasarkan hasil pembahasan forum Musrenbang.

Tabel 3.2 SOP Mongolia

Tahapan	Pelaksana	Input	Proses	Output
Identifikasi Permasalahan	Pemerintah Desa, Masyarakat	Aspirasi masyarakat, kondisi wilayah	Musyawarah Desa untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan	Daftar usulan pembangunan
Input Usulan	Admin Desa	Daftar usulan pembangunan	Menginput usulan ke SIPD-RI sesuai ketentuan	Data usulan pada SIPD-RI
Verifikasi Awal	Pemerintah Kecamatan	Data usulan SIPD-RI	Memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian usulan	Usulan siap dibahas

Forum Musrenbang	Bappeda, Kecamatan, Desa, OPD	Data usulan SIPD-RI	Pembahasan dan penyampaian usulan pembangunan	Hasil pembahasan
Klarifikasi	Tim Verifikator Bappeda	Data usulan dan hasil pembahasan	Klarifikasi substansi, lokasi, kewenangan, dan nomenklatur	Catatan klarifikasi
Verifikasi	Tim Verifikator Bappeda	Catatan klarifikasi	Verifikasi administrasi dan teknis usulan	Status verifikasi
Penyempurnaan Data	Admin Desa/Admin Kecamatan	Hasil verifikasi	Memperbaiki data usulan secara langsung pada SIPD-RI	Data usulan yang telah diperbarui
Validasi	Tim Verifikator Bappeda	Data usulan hasil penyempurnaan	Melakukan validasi akhir usulan	Usulan tervalidasi
Penyusunan Prioritas RKPD	Bappeda	Usulan tervalidasi	Menyusun prioritas pembangunan daerah	Prioritas RKPD

3.3.1 Ketentuan Operasional

Dalam pelaksanaan MONGOLIA, setiap tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan operasional sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

- Seluruh usulan pembangunan harus telah diinput ke dalam SIPD-RI sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan.
- Data usulan yang dibahas dalam forum mengacu pada data yang tersedia pada SIPD-RI.
- Seluruh peserta forum wajib menggunakan data yang sama sebagai dasar pembahasan.

2. Ketentuan Klarifikasi dan Verifikasi

- Klarifikasi dilakukan terhadap substansi usulan, lokasi kegiatan, kewenangan, nomenklatur, serta kelengkapan data pendukung.
- Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator Bappeda berdasarkan ketentuan penyusunan RKPD dan regulasi yang berlaku.
- Setiap hasil klarifikasi menjadi dasar penyempurnaan data usulan.

3. Ketentuan Penyempurnaan Data

- Penyempurnaan data dilakukan langsung oleh Admin Desa atau Admin Kecamatan selama forum Musrenbang berlangsung.
- Perubahan data harus sesuai dengan hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Verifikator.
- Seluruh perubahan tersimpan secara *real-time* pada SIPD-RI.

4. Ketentuan Validasi

- Validasi dilakukan setelah seluruh data usulan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- Usulan yang telah divalidasi menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah.
- Usulan yang belum memenuhi ketentuan tidak dapat ditetapkan sebagai usulan tervalidasi.

3.3.2 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan

Pelaksanaan MONGOLIA dinilai berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut.

Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan

Indikator	Target
Seluruh desa menginput usulan ke SIPD-RI	100%
Musrenbang dilaksanakan sesuai jadwal	100%
Usulan diverifikasi pada saat forum	100%
Penyempurnaan data dilakukan secara <i>real-time</i>	100%
Usulan tervalidasi sebelum Musrenbang Kabupaten	100%

3.4 Monitoring dan Evaluasi Mongolia

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MONGOLIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan. Monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan MONGOLIA berjalan sesuai dengan pedoman teknis, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi inovasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan Musrenbang pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Tim Verifikator, serta perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak tahap persiapan, selama pelaksanaan Musrenbang, hingga setelah seluruh rangkaian Musrenbang RKPD Kecamatan selesai dilaksanakan.

3.4.1 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh tahapan MONGOLIA berjalan sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fokus monitoring meliputi kesiapan pelaksanaan, kelancaran proses pembahasan, pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi, penyempurnaan data pada SIPD-RI, serta validasi usulan pembangunan.

Monitoring dilaksanakan melalui observasi langsung pada saat pelaksanaan Musrenbang, pemantauan data usulan pada SIPD-RI, serta pemeriksaan dokumen administrasi yang dihasilkan selama proses Musrenbang.

Tabel 3.4 Monitoring Mongoilia

No	Aspek yang Dimonitor	Indikator
1	Kesiapan Pelaksanaan	Jadwal, peserta, sarana dan prasarana tersedia
2	Data Usulan	Seluruh usulan telah diinput ke SIPD-RI
3	Pelaksanaan Forum	Forum berlangsung sesuai agenda Musrenbang
4	Klarifikasi dan Verifikasi	Seluruh usulan memperoleh proses klarifikasi dan verifikasi
5	Penyempurnaan Data	Perbaikan data dilakukan sesuai hasil pembahasan
6	Validasi	Seluruh usulan tervalidasi sebelum penutupan forum

3.4.2 Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian Musrenbang RKPD Kecamatan selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi MONGOLIA berdasarkan pencapaian indikator kinerja, kualitas proses pelaksanaan, serta efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi Bappeda dalam melakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan MONGOLIA pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.5 Ukuran Keberhasilan

No	Indikator	Ukuran Keberhasilan
1	Ketepatan waktu pelaksanaan	Seluruh Musrenbang terlaksana sesuai jadwal
2	Kualitas data usulan	Data lengkap dan sesuai ketentuan SIPD-RI
3	Pelaksanaan verifikasi	Seluruh usulan telah diverifikasi selama forum berlangsung

4	Penyempurnaan data	Perbaikan dilakukan secara <i>real-time</i>
5	Validasi usulan	Seluruh usulan tervalidasi sebelum Musrenbang Kabupaten
6	Koordinasi antar pemangku kepentingan	Proses pembahasan berjalan efektif dan kolaboratif

3.4.3 Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Setelah seluruh tahapan Musrenbang RKPD Kecamatan selesai dilaksanakan, Bappeda menyusun laporan pelaksanaan MONGOLIA sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan inovasi. Laporan tersebut memuat informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang, hasil klarifikasi dan verifikasi usulan, penyempurnaan data pada SIPD-RI, hasil validasi usulan, serta berbagai kendala dan rekomendasi perbaikan yang diperoleh selama pelaksanaan.

Dokumen laporan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Musrenbang tahun berikutnya serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.5 Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Tahapan	Pelaksana	Waktu	Output
Monitoring Persiapan	Bappeda	Sebelum Musrenbang	Kesiapan pelaksanaan
Monitoring Pelaksanaan	Tim Verifikator Bappeda	Selama Musrenbang	Hasil monitoring pelaksanaan
Monitoring Data SIPD-RI	Bappeda dan Admin SIPD-RI	Selama Musrenbang	Data usulan yang diperbarui
Evaluasi Pelaksanaan	Bappeda	Setelah Musrenbang Kecamatan selesai	Laporan evaluasi

Penyusunan Laporan	Bappeda	Pasca evaluasi	Laporan Pelaksanaan MONGOLIA
--------------------	---------	----------------	---------------------------------

3.4.4 Tindak Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi

Temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi dasar bagi Bappeda untuk melakukan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan MONGOLIA. Tindak lanjut dapat berupa penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan pedoman teknis, serta optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI sebagai pendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) yang dapat dipertahankan maupun direplikasi pada penyelenggaraan Musrenbang di tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

Penutup

Pedoman Teknis MONGOLIA (Musrenbang Online) disusun sebagai acuan pelaksanaan inovasi tata kelola Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Pedoman ini memberikan arah yang jelas mengenai konsep inovasi, proses bisnis, tahapan pelaksanaan, mekanisme kerja, pembagian peran para pihak, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga penyelenggaraan Musrenbang dapat berlangsung secara terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan MONGOLIA merupakan bentuk optimalisasi proses perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi proses pembahasan usulan dengan mekanisme klarifikasi, verifikasi, penyempurnaan, dan validasi usulan pembangunan secara kolaboratif dan *real-time* melalui SIPD-RI. Pendekatan ini mendukung tersedianya data usulan pembangunan yang lebih akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses penyusunan prioritas pembangunan daerah pada setiap tahapan penyusunan RKPD.

Keberhasilan implementasi MONGOLIA memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbang, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, Tim Verifikator Bappeda, hingga unsur masyarakat. Pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing secara konsisten akan mendukung terciptanya proses perencanaan yang lebih partisipatif, efektif, transparan, dan akuntabel.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), substansi dalam pedoman teknis ini dapat disesuaikan dan disempurnakan agar tetap relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang serta dinamika tata kelola pemerintahan daerah. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan MONGOLIA, perubahan regulasi, maupun masukan dari para pemangku

kepentingan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pedoman teknis ini diharapkan menjadi referensi operasional dalam penyelenggaraan MONGOLIA sehingga pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan dapat berlangsung secara lebih efektif, menghasilkan usulan pembangunan yang berkualitas, serta mendukung terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.